

**PENGARUH PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN DAN KEMANFAATAN NPWP
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

NI LUH PANDE DEVI PUSPITASARI

2013310630

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA**

2019

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Ni Luh Pande Devi Puspitasari
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 6 Januari 1996
N.I.M : 2013310630
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
judul : Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak, Pemahaman
Perpajakan dan Kemanfaatan NPWP Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 12 April 2019



(Dr. Nurmala Ahmar, S.E., Ak., M. Si)

Co. Dosen Pembimbing,

Tanggal : 12 April 2019



(Zakiah, S. E., M. ACC)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal : 12 April 2019



(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., CA, CIBA, CMA)

**PENGARUH PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN DAN KEMANFAATAN NPWP
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Ni Luh Pande Devi Puspitasari

2013310630

STIE Perbanas Surabaya, Indonesia

E-Mail : Niluhpandedevip@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether the perception of taxation sanctions, understanding of taxation and the benefits of NPWP had a significant effect on tax compliance. The sample population in this study is the Personal Taxpayer, namely the employee or employee who reports the Annual Tax Return at KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Data was obtained from distributing questionnaires to respondents then the data was collected and managed through SPSS. The number of samples used was 100 respondents and as many as 82 questionnaires returned completely and can be processed. By using logistic regression techniques, the results of the study show that the taxation sanction perception variable has a significant effect on taxpayer compliance. Giving sanctions that burden taxpayers will make taxpayers choose actions to behave obediently in carrying out their tax obligations. Meanwhile, understanding taxation and the benefits of NPWP have no significant effect on tax compliance.

Keywords: *taxpayer compliance, tax sanctions, understanding of taxation, benefits of NPWP.*

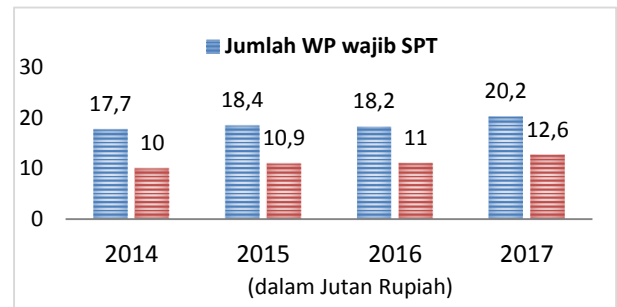
PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang memiliki peranan penting untuk kelangsungan hidup suatu bangsa. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu (Soemitro, 1992). Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau

dari hasil kekayaan alam yang ada di negara itu. Pungutan pajak mengurangi penghasilan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui fasilitas umum untuk masyarakat seperti pembangunan jembatan, pembangunan jalan raya, pembangunan halte, dan sebagainya.

Pajak memiliki fungsi finansial dan fungsi mengatur. Fungsi finansial tersebut yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan Fungsi Mengatur yaitu Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Ketut Evi dan Ketut Budiarta, 2013). Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan pendapatan suatu negara. Peraturan perpajakan yang telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan telah disesuaikan dengan beberapa aspek diharapkan dapat membuat sistem perhitungan dan pemungutan pajak semakin efektif dan efisien, memberi kemudahan bagi para pemakai produk hukum, serta berdampak pada peningkatan penerimaan negara.



Gambar 1

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Pajak 2014-2017

Sumber : BPS, Departemen Keuangan

Gambar 1.1 tersebut menunjukkan peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Pajak dari tahun 2014–2017. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahun tetapi besarnya masih jauh lebih rendah dari jumlah Wajib pajak yang wajib SPT yang ditunjukkan pada gambar yaitu pada tahun 2014 jumlah WP yang wajib SPT sebesar 17,7 Juta dan pada realisasinya hanya sebesar sepuluh juta. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran Wajib pajak dalam penyampaian SPT Pajak. Selain menerima hak sebagai Wajib pajak, para Wajib pajak juga harus memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencatat realisasi penerimaan pajak selama semester pertama tahun ini dari wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 61,4 triliun yang mencakup penerimaan PPh 21 sebesar Rp 55,6 triliun dan PPh 25/29 orang pribadi sebesar Rp 5,8 triliun. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Yon Aرسال menyatakan, terjadi pertumbuhan pada penerimaan PPh 25/29 yang mencapai 55,5% dibandingkan dengan semester pertama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3,7 triliun. Peningkatan ini antara lain disebabkan terdapat peningkatan setoran pajak dari wajib pajak peserta amnesti pajak. Sementara itu, penerimaan PPh 21 semester 1 tahun 2018 sendiri tumbuh negatif 4,43% dibanding semester 1 2017 yang sebesar Rp 58,2 triliun. Penyebabnya adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku di semester 1 tahun ini sudah menggunakan PTKP baru sebesar Rp 54 juta per tahunnya, sementara di semester 1 tahun lalu masih menggunakan PTKP lama atau Rp 36 juta per tahunnya.

Hampir semua daerah mengalami penurunan yang signifikan PPh 21 nya akibat PTKP yang baru ini. Untuk Juli sendiri PPh 21 sudah mulai mengalami pertumbuhannya 25% dibanding Juli tahun lalu. Hanya saja, penerimaan bulan Juli itu belum bisa mengompensasi pertumbuhan negatif sebelumnya (Kontan.co.id). Sehingga dapat disimpulkan jika masih banyak masyarakat Indonesia belum sepenuhnya patuh untuk rutin dalam pembayaran pajak. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut terkait hal – hal yang

menyebabkan wajib pajak rutin dalam membayar pajak setiap tahunnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak, diantaranya persepsi sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kemanfaatan NPWP.

Faktor yang pertama yaitu persepsi sanksi perpajakan yang merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Ketut Evi dan Ketut Budiarta, 2013). Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena menurut teori atribusi sanksi perpajakan merupakan salah satu penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian dari Arabella dan Yenni (2013); Ketut Evi dan Ketut Budiarta (2013); Diyat (2015); Nelsi (2017); Viktor, Agus dan Robert (2016); Putu dan Ni Luh (2016) menyatakan jika persepsi sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan memandang sanksi perpajakan yang ada lebih banyak merugikan Wajib Pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, Namun hasil penelitian berbeda dinyatakan oleh Siti dan Zulaikha (2013) dan Iva (2014) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menandakan pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan.

Faktor yang kedua yaitu pemahaman perpajakan yang didefinisikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Diyat, 2015). Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena berdasarkan teori atribusi, pemahaman perpajakan wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian dari Siti dan Zulaikha (2013); Evi dan Budiarta (2013); Diyat (2015); Iva (2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian yang berbeda dinyatakan oleh Nelsi (2017) dan Ernawati (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham secara terperinci terkait segala peraturan perpajakan yang ada. Dari hasil pengamatan peneliti masih banyak wajib pajak yang belum mampu untuk mengisi SPTnya sendiri.

Faktor yang ketiga yaitu kemanfaatan NPWP. Menurut Ainil (2015) kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Manfaat berarti guna, faedah, laba, atau untung. Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena menurut teori atribusi, kemanfaatan NPWP merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian dari Ainil (2015) menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. Namun hasil penelitian yang berbeda dari Siti dan Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kemanfaatan NPWP tidak diperoleh atau dirasakan sepenuhnya oleh semua wajib pajak. Kemanfaatan NPWP dapat diperoleh atau dirasakan bagi wajib pajak yang

membutuhkan atau memiliki kepentingan saja.

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang berbeda diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang sama namun pada sampel dan periode yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang pengaruh persepsi sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Perilaku dapat disebabkan melalui dua hal yaitu dari internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan dengan cara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksakan berperilaku demikian oleh situasi. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Keterkaitan teori atribusi dalam penelitian ini yaitu teori ini digunakan sebagai dasar hipotesis mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak seperti Persepsi Sanksi perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Kemanfaatan NPWP. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Apabila Wajib Pajak

memikirkan adanya sanksi perpajakan yang dapat dikenakan saat Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010 : 32).

Persepsi Sanksi perpajakan

Suranto (2010 : 107) mendefinisikan persepsi sebagai berikut:

“Persepsi merupakan proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya.”

Mardiasmo (2011 : 59) mendefinisikan sanksi perpajakan adalah:

“Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Berdasarkan definisi para ahli maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa persepsi sanksi perpajakan adalah proses individu dalam memahami sanksi yang dikenakan kepada Wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Berdasarkan sudut pandang yuridis pajak mengandung unsur paksaan yang berarti bahwa kewajiban perpajakan jika tidak dilakukan, maka ada konsekuensi hukum yang akan diterima. Konsekuensi hukum tersebut meliputi sanksi perpajakan.

Pada dasarnya diberlakukannya sanksi perpajakan untuk menciptakan kepatuhan Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pentingnya bagi Wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan untuk mengetahui konsekuensi yang diterima jika melakukan pelanggaran.

Pemahaman perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011 : 50) pemahaman perpajakan Wajib pajak adalah pemahaman perpajakan Wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan pemahaman perpajakan dari wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia karena, dalam sistem perpajakan di Indonesia wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggungjawab sepenuhnya dalam mengisi SPT, yaitu dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Kemanfaatan NPWP

Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah nomor yang diberikan kepada Wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

kemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat, kemanfaatan berasal dari kata benda yang dapat diartikan sebagai hal yang ber(manfaat) atau kegunaan (<https://kbbi.kata.web.id/kemanfaatan/>).

Berdasarkan definisi tersebut maka kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh para wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Pengaruh Persepsi Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010 : 32). Persepsi sanksi perpajakan adalah proses individu dalam memahami sanksi yang dikenakan kepada Wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pengendali wajib pajak agar tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena berdasarkan teori atribusi sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan kepada pelanggar aturan perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Diyat (2015), yang menyatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Hipotesis 1 : Persepsi sanksi perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010 : 32). Menurut Mardiasmo (2011:50) pemahaman perpajakan Wajib pajak adalah pemahaman perpajakan bagi Wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena berdasarkan teori atribusi, pemahaman perpajakan wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013), yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Hipotesis 2 : Pemahaman perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak.

Pengaruh Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

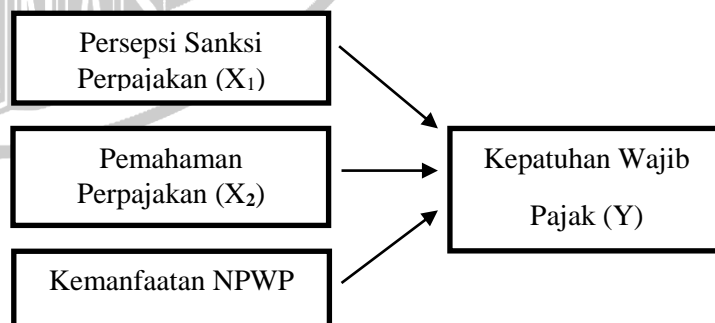
Kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010 : 32). Manfaat NPWP adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena berdasarkan teori atribusi, kemanfaatan NPWP merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak manfaat yang diperoleh Wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan Wajib pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Huda (2015), yang menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 3 : Kemanfaatan NPWP mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak.

Kerangka Pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2

Kerangka Pemikiran

METEDO PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak yang ada di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Sampel pada penelitian ini adalah Wajib pajak Orang Pribadi yaitu karyawan atau pegawai yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi logistik. Penelitian ini menggunakan pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya atau yang disebut *convenience sampling* dari metode *nonprobability sampling* (Sekaran, 2006 :136).

Data Penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sekunder yaitu merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut yaitu berupa jumlah wajib pajak yang terdaftar. Teknik pengambilan data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Data tersebut dikumpulkan dan kemudian dikelola melalui SPSS. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengukuran statistik dengan menggunakan *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu *kepatuhan wajib pajak* dan variabel independen terdiri dari *persepsi sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kemanfaatan npwp*.

Alat Analisis

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi

Logistik. Regresi Logistik digunakan karena variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan data yang bersifat *non metric*, sedangkan pada variabel independen dalam penelitian ini menggunakan data *metric*. Berdasarkan adanya campuran pengukuran pada variabel dependen dengan variabel independen maka menyebabkan asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat terpenuhi sehingga menggunakan bentuk fungsi logistik yang tidak membutuhkan asumsi normalitas pada variabel independennya. Pengukuran variabel independen dapat dinyatakan dengan nilai 0 untuk menunjukkan wajib pajak tidak patuh dan nilai 1 untuk menunjukkan wajib pajak patuh.

Persamaan Regresi Logistik sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan:

Ln = Log natural

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

P = Probabilitas kepatuhan wajib pajak

X1 = Persepsi Sanksi perpajakan

X2 = Pemahaman perpajakan

X3 = Kemanfaatan NPWP

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi, tanpa melakukan analisis dan kemudian membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017: 29). Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari jawaban responden pada masing-masing variabel, akan dihitung secara manual pada SPSS dan akan diperoleh gambaran secara umum bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel berdasarkan rata-rata.

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	82	.00	6.00	5.0366	1.24171
Valid N (listwise)	82				

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 1 hasil uji statistik deskriptif diatas, untuk mengetahui tanggapan dari responden atas item-item pertanyaan yang diajukan untuk variabel dependen dapat ditentukan dengan mencari nilai rata-rata jawaban dari responden berdasarkan rumus berikut:

Interval Kelas =

$$\frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{jumlah kelas}}$$

$$\text{Interval Kelas} = \frac{6-0}{2} = 3$$

Kategori untuk kepatuhan wajib pajak ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika rata-rata jumlah kepatuhan wajib pajak < 3 dikategorikan tidak patuh.

b. Jika rata-rata jumlah kepatuhan wajib pajak > 3 dikategorikan patuh.

Berdasarkan Tabel 1 nilai rata-rata jumlah kepatuhan wajib pajak sebesar 5,04 > 3 sehingga responden dalam penelitian ini dapat dikategorikan patuh. Rata-rata ini menggambarkan bahwa responden wajib pajak telah berusaha semaksimal mungkin untuk patuh pada aturan-aturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I.for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Presepsi Sanksi Perpajakan (X1)	.605	.281	4.641	1	.031	1.830	1.056	3.173
	Pemahaman perpajakan (X2)	.110	.098	1.262	1	.261	1.116	.921	1.352
	Kemanfaatan NPWP (X3)	.111	.104	1.136	1	.286	1.117	.911	1.369
	Constant	-12.359	4.827	6.556	1	.010	.000		

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil koefisien regresi logistik di atas diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$\text{Ln } \frac{p}{1-p} = -12,359 + 0,605 \text{ Persepsi Sanksi Perpajakan} + 0,110 \text{ Pemahaman Perpajakan} + 0,111 \text{ Kemanfaatan NPWP}$$

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho: Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ha: Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian masing-masing koefisien regresi logistik menunjukkan bahwa variabel persepsi sanksi perpajakan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pemahaman perpajakan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,261 yang lebih besar dari 0,05, maka H_1 ditolak artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kemanfaatan NPWP mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,286 yang lebih besar dari 0,05 maka H_3 ditolak artinya bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien bernilai positif yaitu 0,605 dan nilai signifikansi yaitu 0,031 yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti bahwa persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai

koefisien regresi variabel persepsi sanksi perpajakan yaitu 0,605 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin persepsi sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,605 dan ini menyebabkan hubungan positif antara variabel persepsi sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak artinya apabila persepsi sanksi perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila persepsi sanksi perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak juga akan rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nelsi (2017), Viktor dkk (2016), Putu (2016) yang menyatakan bahwa persepsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti (2013) yang menyatakan bahwa persepsi sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan tertib administrasi agar para wajib pajak dapat mentaati peraturan pajak. Wajib pajak perlu memahami sanksi perpajakan sehingga mereka akan lebih tertib dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat waktu agar sanksi perpajakan ini tidak dikenakan kepada wajib pajak. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak memilih tindakan yang akan dilakukan yaitu untuk memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi sanksi pajak dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak memilih tindakan untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dapat dilakukan melalui sanksi perpajakan seperti meningkatkan nominal denda, melakukan pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi perpajakan dapat dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak bahwa sanksi perpajakan dapat merugikan dirinya maka akan berdampak pula terhadap kepatuhan wajib pajaknya.

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada hasil pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak, hal ini dapat dilihat dari nilai nilai signifikansi variabel pemahaman perpajakan yaitu 0,261 yang lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti bahwa pemahaman perpajakan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ernawati (2018) dan Nelsi (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Iva (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dapat terjadi karena masih kurangnya pemahaman perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak juga masih rendah. Kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Pemahaman wajib

pajak berkaitan dengan peraturan pajak seperti batas akhir pembayaran pajak, besarnya pajak yang harus dibayarkan dan ketentuan pajak yang berlaku. Selain itu, seseorang yang memiliki pemahaman atas perpajakan juga tidak menjamin wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya karena terkadang seorang yang sibuk dalam pekerjaan dapat terlupakan untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga terlambat melaporkan SPT dan melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya.

Peningkatan pemahaman perpajakan wajib pajak tentang peraturan perpajakan seperti tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan pajak, batas akhir pelaporan pajak, besarnya pajak yang harus dibayarkan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan peraturan perpajakan harus terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik wajib pajak atau fiskus sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Surabaya Karangpilang akan semakin meningkat.

Pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada hasil pengujian hipotesis yang menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) ditolak, hal ini dapat dilihat dari nilai nilai signifikansi variabel kemanfaatan NPWP yaitu 0,286 yang lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Hal ini menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti (2013) yang menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ainil

(2015) yang menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dapat terjadi karena kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Meskipun telah memiliki NPWP, banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepemilikan NPWP di KPP Surabaya Karangpilang dinilai belum dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak sehingga wajib pajak belum termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak akan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWPnya.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh persepsi sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Karangpilang. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel persepsi sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama diterima. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak memilih tindakan yang akan dilakukan yaitu untuk memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua ditolak. Hal ini dapat terjadi karena tidak selalu

seseorang yang paham perpajakan akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan seseorang tersebut sibuk terhadap pekerjaannya sehingga terkadang lupa atau terlambat dalam melaporkan SPT.

3. Variabel kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hal ini dapat terjadi karena kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya

Pada penelitian ini muncul beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Berikut adalah beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah kebanyakan responden di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang tidak mau meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner karena mempunyai urusan yang mendadak sehingga hasil yang didapat pun tidak maksimal.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dapat dilakukan perbaikan dalam penelitian ini di masa mendatang yaitu sebaiknya penyebaran kuesioner pada wajib pajak orang pribadi menyediakan makanan atau souvenir yang menarik untuk para responden sehingga dapat menarik minat responden dalam mengisi kuisisioner.

DAFTAR RUJUKAN

Ainil Huda. 2015. "Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib pajak Umkm Makanan Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)". *Jom FEKON*. Vol. 2 No. 2 Oktober 2015

- Ajzen, I. 2005. *Attitudes, Personality and Behavior, 2nd Edition*. Berkshire, GBR: McGraw-Hill Professional Publishing.
- Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting. 2013. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013
- Diani Widiastuti., Endang S.A., dan Heru Susilo. 2014. "Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, Dan Pemahaman perpajakan Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)". *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. Vol 3, No 1 (2014): Desember.
- Emielia, Mareta., Siti R.H., dan Achmad Husaini. 2014. "Pengaruh Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Pada Wajib pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Batu)". *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol.3, No.1.
- Erly Suandy, 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ernawati. 2018. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemampuan Membayar Pajak (Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Barabai)
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Udayana.
- I Gusti Ngurah Mahardika. 2015. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Singaraja". *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*. Volume: 5 Nomor: 1 Tahun: 2015.
- Iva Farida Hidayati. 2014. "Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)". Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keprilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Jogiyanto Hartono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2 (2013): 345-357
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan, edisi revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.

- Nelsi Arisandy. 2017. "Pengaruh Pemahaman perpajakan Wajib pajak, Kesadaran Wajib pajak Dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 14., No.1.
- Putu Rara Sasmita dan Ni Luh Supadmi. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *E-filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 14.2 Februari (2016). 1239-1269 .
- Rahman. Abdul (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Republik Indoneisa. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Republik Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Data APBN.
- Rolalita Lukmana Putri. 2016. "Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015". Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasional*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochmat Soemitro. 1992. "*Hukum Pajak Edisi Keenam*". Jakarta
- Samsudin sadii. 2010. *Menajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Vol.2. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis* (cetakan ke 16). Bandung: CV Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Siti, Masruroh. 2013. "Pengaruh Kemanfaaaatan Npwp, Pemahaman perpajakan Wajib pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)". *DIPONEGORO JOURNAL OF*

ACCOUNTING. Volume 2, Nomor 4,
Tahun 2013, Halaman 1-15.

Suranto, Aw. 2010. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syofian, Siregar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana.

Titik Aryati. 2012. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Badan”. *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*. Vol.25. No.1.

Viktor, Billi Josua T., Agus T.P., dan Robert L. 2016. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung)”. *Jurnal EMBA*. Vol.4. No.4. Desember 2016. Hal 912 – 921.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Vol.1 Edisi Kesembilan. Jakarta : Salemba Empat.

Wartasas.com. 2017. “KPP Pratama Surabaya Karangpilang Masuk Nominasi KPPc Terbaik”. (Online), Berita Online, (<http://wartasas.com/polhukam/kpp-pratama-surabaya-karangpilang-masuk-nominasi-kppc-terbaik/>, Diakses 15 Januari 2018)

Widi widodo, 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung : Alfabeta

Yenni, Mangoting, dan A. Sardiarjo. 2013. “Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 15, No. 2, November 2013, 106-116.